

**REKAPITULASI  
DAFTAR INVENTARIS MASALAH (DIM)  
PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN  
ANGGARAN 2018**

KPU KABUPATEN : CIREBON

<b>NO</b>	<b>URAIAN MASALAH</b>	<b>REKOMENDASI</b>
1	PAGU ANGGARAN	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pagu belanja pegawai belum sesuai dengan jumlah pegawai dan kepegangannya;</li>   <li>- Terdapat Pagu anggaran yang belum jelas pelaksanaan atau peruntukannya karena pada juknis DIPA tidak dijelaskan secara mendetail contoh : anggaran pengadaan logistic sejumlah 5 milyar, pengadnan sewa gudang sementara sebesar 115 juta rupiah dan yang lainnya</li>   <li>- Honorarium PPK dan PPK hanya 7 bulan;</li>   <li>- Besaran perjalanan dinas dari PPS ke PPK dan sebaliknya serta dari PPK ke KPU terlalu kecil;</li>   <li>- Dalam Pagu Badan Adhoc sama sekali tidak ada kegiatan sosialisasi tahapan pemilu;</li> </ul>	<p>Hendaknya ketika membuat perencanaan anggaran, KPU RI mengambil data dari aplikasi GPP sebagai dasar penyusunan anggaran belanja pegawai</p> <p>Perlu adanya surat edaran terkait penjelasan-penjelasan kegiatan terutama yang nominal pagunya besar;</p> <p>Perlu segera ada revisi anggaran dari KPU RI karena Tahapan Pemilu tidak bisa menunggu</p> <p>Perlu dilakukan update satuan biaya perjalanan dinas badan adhoc;</p> <p>Dalam rangka meningkatkan partisipasi hendaknya kegiatan di badan adhoc diperbanyak.</p>

2	<p>PELAKSANAAN KEGIATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyerapan anggaran belum optimal karena disibukan dengan kegiatan-kegiatan pilkada. Sampai dengan triwulan ke II anggaran rutin penyerapannya masih kecil;</li> <li>- Masih lemahnya koordinasi antara subbag pelaksana kegiatan dengan bendahara atau subbag keuangan terutama dalam pengajuan kegiatan. Seperti batas pengajuan SPM dan administrasi keuangan lainnya yang kadangkala tidak mendukung pada tahapan Pemilu dikarenakan informasi yang mendadak;</li> <li>- Kurang optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pada DIPA sehingga banyak sekali anggaran yang tidak terserap;</li> <li>- Pada saat satker melakukan Revisi anggaran/POK, DIPA satker terakhir tidak terupdate di data KPU RI. Sehingga ketika KPU RI melakukan Revisi anggaran, data DIPA Satker kembali ke data awal sebelum revisi POK;</li> </ul>	<p>Perlu adanya penjadwalan kegiatan melalui rencana aksi kegiatan di Internal KPU Kab Cirebon;</p> <p>Perlunya bimbingan teknis atau rapat koordinasi antara subbag dalam membahas tahapan atau jadwal kegiatan dan tahapan-tahapan proses administrasi keuangan yang harus dipahami oleh seluruh pelaksana kegiatan</p> <p>Perlu dibuat tim pengawas kegiatan yang bertugas khusus mengawal seluruh kegiatan tanpa terlibat langsung dalam kegiatan;</p> <p>Perlu ada instruksi kepada satker mengenai langkah-langkah dalam melakukan revisi anggaran agar DIPA yang sudah di Revisi dapat terupdate datanya oleh KPU RI</p>
---	--	---

Cirebon, 14 Agustus 2018  
 Sekretaris  
 KPU Kabupaten Cirebon

  
 Sonson Mohamad Ichsan  
 NIP. 19671130 199603 1 002